

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi dan pelaporan bidang keuangan membutuhkan laporan keuangan dengan kualitas baik. Kualitas laporan keuangan yang dilaporkan harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya. Laporan keuangan berkualitas tinggi memiliki informasi yang jelas dan menyeluruh, yang dirancang dengan hati-hati agar tidak membingungkan. Meningkatkan kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sangat penting untuk mendapatkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Laporan keuangan pemerintah harus akurat karena laporan tersebut mencerminkan kualitas manajemen pemerintah. Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan yaitu pelaporan data keuangan yang dibuat berdasarkan keuangan dan penggunaan dana pada suatu SKPD. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang mendalam tentang penempatan keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas, sehingga membantu para pengambil keputusan.

Informasi keuangan yang didapat dari kualitas dari pelaporan keuangan penting, supaya mereka dapat memberikan informasi yang berharga bagi pengguna. Kualitas pelaporan keuangan melibatkan informasi yang jelas dan tidak kurang, dirancang untuk menghindari kekacauan. Kinerja SKPD harus ditingkatkan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat. Beberapa pemerintah daerah masih kesulitan menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara efektif memakai aplikasi SIPD (Hamdi, 2023; Bustanuddin et al., 2023; Dewi et al., 2023). Laporan keuangan yang baik sangat penting karena mencerminkan kualitas manajemen pemerintah.

Laporan keuangan sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah, sehingga pemerintah wajib bisa memperolehnya dengan kualitas tinggi. Defitri (2018) dan Akhmad et al. (2017) menyarankan bahwa meningkatnya laporan keuangan berbanding lurus dengan peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah. Laporan-laporan ini menunjukkan bagaimana suatu entitas mengelola keuangan dan informasinya. Pelaporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (Defitri, 2014). Untuk mencegah asimetri informasi dalam manajemen keuangan daerah, pejabat pemerintah perlu memahami anggaran daerah mereka (Defitri et al., 2016). Penyediaan ringkasan anggaran yang sederhana dan menangani masalah terkait dapat meningkatkan efektivitas laporan keuangan.

Relevansi laporan keuangan SKPD akan meningkat dengan SDM yang lebih baik, penggunaan teknologi informasi (TI), pemantauan akuntansi internal, dan pengawasan keuangan daerah (Azlan et al., 2015). Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Cilacap, yang memiliki upah minimum tertinggi ketiga di Jawa Tengah (BPS, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Sirait (2020) bahwa komponen LKPD dipengaruhi oleh upah atau gaji yang tinggi.

Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat memiliki konsekuensi negatif, seperti mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik dan mempengaruhi kualitas keputusan (Alfiani, 2017). SDM yang andal dan berkualitas tinggi sangat penting, karena dampak negatif pada kualitas laporan keuangan terjadi akibat kesalahan dalam pembukuan. SDM adalah aset penting bagi sebuah organisasi, dan kualitas laporan keuangan dapat dinilai berdasarkan kompetensi penulisnya.

Pengembangan SDM berbasis kompetensi akan

meninggikan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya akan menguntungkan bagi perusahaan (Azlan et al., 2015).

Guna menggapai tujuan dan sasaran organisasi, SDM harus dikembangkan berdasarkan kompetensi. Sangat penting untuk memiliki kemampuan untuk mendukung laporan keuangan melalui kinerja strategis. Akibatnya, kinerja individu di perusahaan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia berkualitas tinggi dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan dan kinerja individu. Pengaruh SDM terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sangat besar (Hendri & Erinis, 2020).

Penggunaan teknologi informasi yang tepat memastikan laporan keuangan yang luar biasa. Organisasi telah merencanakan kerangka data berbasis situs web atau inovasi PC sebagai respons terhadap perkembangan TI. Kerangka data yang ditopang oleh TI dapat meningkatkan nilai suatu organisasi. Penggunaan teknologi informasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memengaruhi kualitas laporan keuangan mereka (Zubaidi, 2019). Pemerintah pusat dan kota, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi yang semakin maju untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta memberikan informasi kepada masyarakat. Banyak orang dapat dengan cepat mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi keuangan daerah (Azlan, 2019). Pemerintah daerah harus menggunakan TI dengan membuat aplikasi yang terhubung ke internet untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan daerah.

Kualitas dan ketepatan laporan keuangan dipengaruhi oleh komponen tambahan, seperti sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern dikelola oleh

pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup berbagai aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan staf untuk memastikan operasi yang efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan (Muatiana et al., 2017).

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal badan publik terdiri dari (1) pengendalian iklim, (2) penilaian budaya, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pengecekan kendali masuk. Menurut undang-undang pemerintah, komponen sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Peraturan ini memastikan bahwa semua badan pengawas, pemeriksaan, audit, dan inspeksi melakukan tugas dan elemen yang diperlukan untuk memberikan struktur kepastian yang memadai.

Wardani (2017) melanjutkan penelitian sebelumnya dengan menyelidiki hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan. Dalam hal yang sama, Rizka et al. (2021) menyelidiki hubungan antara kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal. Triono dan Dewi (2020) juga menyelidiki hubungan antara kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal dan informasi. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memperkenalkan variabel baru dan berfokus pada kompetensi sumber daya manusia, penggunaan TI, dan sistem pengendalian internal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disediakan sebelumnya, penelitian ini mengkaji tentang:

- a. Apakah keahlian SDM memiliki efek positif pada kualitas laporan keuangan?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi yang efektif meningkatkan kualitas laporan keuangan?
- c. Apakah sistem pengendalian internal berkontribusi secara positif terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Batasan Masalah dibuat untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan membuatnya lebih fokus dan tetap pada inti masalah. Batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Data untuk studi ini dikumpulkan dari instansi pemerintah daerah di Cilacap.
2. Sampel untuk penelitian ini terdiri dari instansi pemerintah daerah di Cilacap pada tahun 2022.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, dengan mempertimbangkan rumusan masalah tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk secara empiris membuktikan pengaruh positif kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk secara empiris menunjukkan dampak positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk secara empiris memverifikasi efek positif sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Keuntungan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kompetensi SDM, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah bagaimana kompetensi SDM, penerapan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Penelitian ini dapat membantu mengevaluasi laporan keuangan dengan memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan menilai laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dengan benar.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk upaya penelitian di masa depan.